



Pendidikan Islam di Era Bani Umayyah: Titik Awal Peradaban Ilmu

Thiesya Futri Amanda Syahrir¹, Aulia Luthvia², Leksa Putri Nagara³, Mahfud Ifendi⁴

¹⁻⁴ STAI Sangatta Kutai Timur, Indonesia

E-mail: thiesyakemong@gmail.com^{1*}, aualialuthvia12@gmail.com²,
leksanagara6363@gmail.com³, mahfudzifindi@gmail.com⁴

Korespondensi penulis: thiesyakemong@gmail.com^{1*}

Abstract. *This article aims to examine the development of Islamic education during the Umayyad Dynasty with a focus on two main aspects: how the Islamic education system was formed and the extent of the government's role in supporting it. By using a qualitative-descriptive approach based on historical studies, and including library research. Data collection techniques use various literature both from history books and from articles in national and international journals and conduct data analysis using content analysis. The results show that Islamic education during that period already had a functional structure through halaqah, mosques, and houses of scholars, although it had not been formally institutionalized. On the other hand, the Umayyad Dynasty government played an important role through Arabization policies, the construction of mosque infrastructure, and the creation of political stability that allowed science to develop. These findings underline that education during the Umayyad period grew from the synergy between community initiatives and structural support from the State.*

Keywords: *Islamic Education, Umayyad Dynasty, Scientific Civilization*

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan pendidikan Islam pada masa Dinasti Bani Umayyah dengan fokus pada dua aspek utama: bagaimana sistem pendidikan Islam terbentuk dan sejauh mana peran pemerintah dalam mendukungnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi historis, dan termasuk penelitian library research. Teknik pengumpulan data menggunakan berbagai literatur baik dari buku sejarah maupun dari artikel di jurnal nasional dan internasional serta melakukan analisis data dengan menggunakan analisis isi atau content analysis. Hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan Islam pada masa tersebut telah memiliki struktur yang fungsional melalui halaqah, masjid, dan rumah-rumah ulama, meskipun belum terinstitusionalisasi secara formal. Di sisi lain, pemerintah Dinasti Bani Umayyah berperan penting melalui kebijakan Arabisasi, pembangunan infrastruktur masjid, dan penciptaan stabilitas politik yang memungkinkan ilmu berkembang. Temuan ini menggarisbawahi bahwa pendidikan pada masa Umayyah tumbuh dari sinergi antara inisiatif masyarakat dan dukungan struktural dari Negara.

Kata kunci: Pendidikan Islam, Bani Umayyah, Peradaban Ilmu

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan dalam Islam bukan sekadar proses transmisi pengetahuan, melainkan merupakan instrumen fundamental dalam membentuk karakter manusia paripurna (insan kāmīl). Sejak wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi perintah untuk membaca (Iqra')(Sulastri, 2016), pesan yang tersirat adalah bahwa peradaban Islam ditopang oleh fondasi ilmu. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi jalan utama untuk membangun kesadaran, membentuk etika sosial, serta membangun peradaban yang berkeadilan dan berkeilmuan. Oleh sebab itu, studi mengenai pendidikan dalam sejarah Islam tidak sekadar kajian retrospektif, melainkan juga menjadi titik tolak untuk memahami dinamika intelektual umat Islam dari masa ke masa.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, pendidikan Islam berkembang dalam bentuk yang sederhana namun substansial. Masjid menjadi pusat pembelajaran, dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai kurikulum utamanya. Proses pendidikan berlangsung melalui pendekatan personal antara guru dan murid, tanpa struktur formal.(As-Tsauri, 2020) Namun demikian, semangat keilmuan telah hidup, ditandai dengan munculnya para ahli tafsir, hadits, dan fikih dari kalangan sahabat dan tabi'in. Namun, memasuki era Bani Umayyah (661–750 M), struktur kekuasaan Islam berubah dari sistem kolektif menjadi dinasti. Perubahan ini berdampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk sistem pendidikan.(Berliana & Zaman, 2024)

Era Bani Umayyah dapat dikatakan sebagai titik awal institusionalisasi ilmu dalam Islam. Meskipun belum terbentuk madrasah formal seperti pada masa Abbasiyah, kebijakan-kebijakan pemerintah saat itu mulai mendorong pengembangan intelektual: mulai dari Arabisasi administrasi negara, penguatan fungsi masjid sebagai pusat ilmu, hingga awal gerakan penerjemahan karya asing. Dinasti Umayyah bukan hanya memperluas wilayah politik Islam, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam transformasi kognitif dan epistemologis umat Islam.

Adapun tujuan dari artikel ini adalah untuk mengeksplorasi dinamika pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah serta mengkaji peran signifikan pemerintah dalam memfasilitasi tumbuhnya ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan bagaimana fondasi peradaban ilmu dalam Islam mulai dibangun secara sistemik dan didorong oleh kebutuhan administratif, sosial, dan religius.

Secara akademik, kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang sejarah pendidikan Islam dan membuka ruang pemikiran yang lebih kritis tentang relasi antara kekuasaan politik dan pertumbuhan ilmu. Sedangkan secara praktis, temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan pijakan konseptual bagi pembuat kebijakan pendidikan di era kontemporer, khususnya dalam merancang sistem pendidikan Islam yang tidak tercerabut dari akar sejarah peradabannya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan historis-deskriptif.(Efendi & Sesmiarni, 2022) Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pendidikan Islam pada masa Dinasti Bani Umayyah secara kronologis dan faktual, sedangkan pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana sistem pendidikan, kurikulum, dan peran pemerintah terbentuk dan dijalankan pada periode tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya memaparkan fakta sejarah, tetapi juga menafsirkan makna serta dampaknya terhadap peradaban ilmu Islam.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka (library research)(Assyakurrohim et al., 2023), dengan mengandalkan sumber-sumber tertulis baik primer maupun sekunder. Sumber primer mencakup kitab-kitab sejarah Islam klasik, seperti karya-karya al-Tabari dan Ibnu Khaldun, serta dokumen sejarah lain yang mencatat perkembangan pendidikan pada masa Bani Umayyah. Sementara itu, sumber sekunder meliputi buku-buku akademik kontemporer, jurnal ilmiah, dan artikel penelitian yang relevan dengan fokus kajian. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif, yaitu memilih secara selektif sumber-sumber yang kredibel dan relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yang berfungsi untuk mengidentifikasi tema-tema utama, relasi antar unsur, serta makna yang terkandung dalam teks-teks sejarah dan literatur keilmuan.(Ahmad, 2018) Proses ini dilakukan dalam tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang berhasil dikumpulkan disaring untuk mengambil poin-poin paling relevan, kemudian disusun secara sistematis ke dalam struktur argumentatif, dan pada akhirnya ditafsirkan untuk merumuskan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem pendidikan Islam di masa Bani Umayyah beserta kontribusi pemerintah dalam mendorongnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan dalam Islam merupakan bagian integral dari visi peradaban yang berlandaskan tauhid. Sejak turunnya wahyu pertama, Islam telah menegaskan urgensi ilmu sebagai pilar pembentukan umat yang berilmu dan berakhlak. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan (ta'lim), tetapi juga pembinaan moral (tarbiyah) dan penanaman adab (ta'dīb), sebagaimana ditegaskan oleh Husaeni.(Husaini, 2020) Oleh karena itu, pendidikan dalam Islam bersifat menyeluruh, menyatukan dimensi spiritual, intelektual, dan sosial dalam kerangka penghambaan kepada Allah SWT.

Pada masa Bani Umayyah, meskipun kekuasaan lebih berorientasi pada ekspansi politik, infrastruktur sosial yang dibangun justru menjadi awal tumbuhnya sistem pendidikan yang lebih terstruktur. Masjid difungsikan sebagai pusat ilmu, sementara Arabisasi administrasi negara oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan memperkuat bahasa Arab sebagai bahasa ilmu. Halaqah-halaqah mulai terbentuk, dan peran ulama sebagai pendidik kian menonjol.(Suhernawati et al., 2025) Di sinilah pendidikan mulai bergerak dari tradisi lisan menuju sistem pembelajaran yang lebih tertib dan terdokumentasi.

Dalam perspektif sosiologis, teori peradaban Ibnu Khaldun memberikan kerangka penting untuk membaca perkembangan ini. Ibnu Khaldun menekankan bahwa ilmu berkembang dalam fase tamaddun sebagai hasil dari stabilitas sosial dan kekuatan negara.

Pendidikan dan ilmu tidak tumbuh dalam ruang hampa, melainkan sangat bergantung pada arah kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Maka, meskipun belum ada institusi formal seperti madrasah, era Bani Umayyah menjadi tahap embrional penting bagi tumbuhnya peradaban ilmu dalam Islam.

Dengan demikian, paradigma pendidikan dan ilmu dalam Islam tidak hanya ditopang oleh nilai-nilai spiritual, tetapi juga didorong oleh kondisi sosial-politik yang mendukung. Masa Bani Umayyah memberikan bukti historis bahwa kekuasaan yang stabil, sistem bahasa yang seragam, serta kebutuhan administratif dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang berkembang. Fondasi ini kelak diteruskan dan diperluas pada masa Bani Abbasiyah, menandai kesinambungan antara pendidikan, peradaban, dan kekuasaan dalam sejarah Islam.

Sejarah Singkat Dinasti Bani Umayyah

Dinasti Bani Umayyah berdiri pada tahun 661 M setelah terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib dan berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang gubernur Syam dari kalangan Quraisy yang memiliki kekuatan politik dan militer yang solid. Berdirinya Bani Umayyah menandai transisi penting dari bentuk kekhalifahan yang bersifat kolektif dan demokratis menuju sistem monarki hereditas. Dinasti ini dinamakan dari nama Umayyah bin Abd Syams, nenek moyang Muawiyah, dan menjadi dinasti Islam pertama yang menerapkan sistem dinasti turun-temurun dalam sejarah politik Islam. (Anton et al., 2024)

Dalam bidang politik, Bani Umayyah dikenal sebagai pemerintahan yang sentralistik dan memiliki strategi ekspansi yang agresif. Kekhalifahan ini memperluas wilayah Islam secara masif, mulai dari wilayah India di timur hingga Spanyol di barat. Ekspansi ini bukan hanya menunjukkan kekuatan militer, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang multikultural, yang pada akhirnya memengaruhi dinamika pendidikan dan budaya ilmu. Dalam menghadapi keberagaman ini, Bani Umayyah menerapkan kebijakan Arabisasi, terutama dalam bidang administrasi dan bahasa resmi negara, untuk memperkuat identitas keislaman dan menyatukan elemen-elemen sosial yang heterogen. (Malik, 2017)

Secara sosial-keagamaan, Bani Umayyah menerapkan kebijakan yang menekankan supremasi Arab dan terkadang menimbulkan ketegangan dengan kelompok non-Arab (*mawālī*). Namun demikian, kebijakan ini secara tidak langsung turut mendorong lahirnya sistem pendidikan yang lebih terstruktur. Kebutuhan akan pengelolaan administrasi negara, penyebaran dakwah Islam ke wilayah baru, dan penataan birokrasi mendorong negara untuk mencetak kader intelektual dan ahli agama yang mumpuni. Di sinilah fungsi pendidikan

menjadi penting, bukan hanya sebagai sarana keagamaan, tetapi juga sebagai alat politik dan sosial.(Rachman, 2018)

Stabilitas kekuasaan yang relatif panjang di bawah beberapa khalifah seperti Abdul Malik bin Marwan dan Al-Walid bin Abdul Malik turut mendukung perkembangan intelektual. Masa pemerintahan mereka ditandai dengan pembangunan infrastruktur seperti masjid, madinah (kota-kota administratif), serta sistem pos dan pencatatan negara yang efisien.(Basri et al., 2024) Pembangunan ini tidak hanya mempermudah kontrol pemerintahan, tetapi juga membuka ruang bagi kegiatan intelektual dan pendidikan, terutama melalui lembaga-lembaga informal seperti halaqah di masjid dan rumah-rumah ulama.

Dengan demikian, meskipun Dinasti Bani Umayyah lebih sering dikenal karena pencapaian militer dan ekspansinya, kontribusinya terhadap dunia pendidikan tidak bisa diabaikan. Justru melalui ekspansi tersebut, kebutuhan akan pendidikan menjadi semakin besar, baik dalam rangka Islamisasi wilayah-wilayah baru maupun dalam mencetak aparat birokrasi yang andal. Stabilitas politik dan kebijakan administratif mereka menjadi fondasi awal bagi kemunculan budaya ilmu yang kemudian berkembang pesat pada masa Bani Abbasiyah.

Perkembangan Pendidikan Islam di Era Bani Umayyah

1. Sistem Pendidikan

Masa kekuasaan Bani Umayyah menandai fase awal pertumbuhan sistem pendidikan Islam yang lebih tertata dibanding masa sebelumnya. Pendidikan yang awalnya bersifat sangat sederhana di masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, mulai mengalami perluasan bentuk dan peran sosialnya. Dinamika ini tidak lepas dari tuntutan zaman: wilayah Islam semakin luas, interaksi lintas budaya meningkat, dan kebutuhan administratif serta religius kian kompleks. Meskipun belum mengenal institusi formal seperti madrasah, era Bani Umayyah telah memperlihatkan kerangka pendidikan yang berjalan secara organik dan fungsional melalui masjid, rumah-rumah ulama, dan halaqah-halaqah keilmuan.(Asari, 2018)

Masjid menjadi institusi sentral pendidikan Islam pada masa ini. Fungsi masjid berkembang dari sekadar tempat ibadah menjadi pusat pembelajaran masyarakat. Di masjid-masjid besar seperti Masjid Umayyah di Damaskus, diadakan halaqah atau lingkaran-lingkaran belajar, tempat para pelajar duduk melingkar mengelilingi seorang guru atau ulama. Materi yang diajarkan mencakup berbagai cabang keilmuan Islam, seperti(Berliana & Zaman, 2024):

- a) Al-Qur'an (tahfidz dan tafsir)
- b) Hadits (pengumpulan, periwayatan, dan pemahaman makna)
- c) Fiqh (hukum Islam dan perbandingannya)

d) Bahasa Arab (nahwu, sharaf, balaghah)

Yang menarik, sistem pendidikan saat itu bersifat inklusif dan terbuka. Tidak ada pembatasan kelas sosial, usia, atau latar belakang etnis. Siapa pun yang ingin belajar, baik dari kalangan Arab maupun mawālī (non-Arab yang masuk Islam), dapat bergabung dalam halaqah-halaqah ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun politik Umayyah sering dikritik karena kesan elitis dan Arab-sentris, sistem pendidikannya tetap terbuka dan egaliter. Bahkan, banyak tokoh non-Arab seperti Abu Hanifah (berasal dari Persia) berhasil menjadi ulama esar setelah melalui jalur pendidikan semacam ini. (WIRANATA & ABIDIN, 2021)

Secara keseluruhan, sistem pendidikan pada masa Bani Umayyah ditandai oleh beberapa karakteristik utama (Yahdi & Achruh, 2024):

- a) Berbasis komunitas: tidak terpusat pada negara, tetapi tumbuh dari inisiatif ulama dan masyarakat.
- b) Terbuka dan inklusif: bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
- c) Berorientasi pada lisan dan hafalan: metode pendidikan menekankan hafalan, talaqqi, dan diskusi langsung.
- d) Tidak terinstitusionalisasi: belum ada struktur madrasah, namun berlangsung secara reguler dan sistematis.
- e) Berpusat pada guru: otoritas keilmuan ditentukan oleh kredibilitas personal seorang guru, bukan lembaga.

Dengan karakteristik-karakteristik tersebut, sistem pendidikan di era Bani Umayyah mungkin belum mencapai tingkat institusionalisasi, tetapi telah memberikan fondasi penting bagi lahirnya tradisi intelektual Islam. Halaqah-halaqah dan jaringan ulama yang berkembang pada masa ini menjadi embrio bagi madrasah-madrasah besar di era Abbasiyah dan kemudian berkembang menjadi universitas Islam klasik. Maka, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sistem pendidikan pada masa Bani Umayyah adalah tahap transisi dari pembelajaran komunitas menuju sistem pendidikan berbasis institusi.

2. Kurikulum Pendidikan

Kurikulum pendidikan pada masa Bani Umayyah tidak disusun secara formal atau tertulis sebagaimana yang dikenal dalam sistem pendidikan modern, tetapi terbentuk secara alamiah melalui kebutuhan masyarakat, kapasitas keilmuan para ulama, serta dinamika sosial-keagamaan yang berkembang. Kurikulum tersebut lahir dari tradisi intelektual yang tumbuh di masjid dan halaqah, sehingga bersifat fleksibel namun tetap berakar pada otoritas ilmu yang sah. Meskipun belum ada institusi resmi negara yang menyusun kurikulum, materi yang diajarkan telah menunjukkan struktur yang cukup teratur dalam proses penyampaiannya.

Materi pendidikan utama berpusat pada ilmu-ilmu keagamaan. Di antaranya (Berliana & Zaman, 2024):

- a) Al-Qur'an, yang dipelajari melalui hafalan, tajwid, dan tafsir.
- b) Hadits, baik dari segi periwayatan (isnad) maupun pemahaman (matan).
- c) Ilmu fikih, yang berkembang sesuai mazhab dan kebutuhan hukum masyarakat.
- d) Bahasa Arab, khususnya nahwu (tata bahasa), sharaf (morfologi), dan balaghah (retorika), yang penting untuk memahami teks-teks agama secara mendalam.

Selain ilmu-ilmu pokok tersebut, berkembang pula ilmu-ilmu pendukung atau yang kini sering disebut sebagai ilmu alat, seperti ilmu arudh (ilmu syair), sejarah Islam, dan genealogi (nasab). Materi-materi ini tidak sekadar diajarkan untuk pengetahuan teoretis, tetapi juga memiliki fungsi praktis dalam kehidupan sosial dan administratif masyarakat Muslim saat itu. Bahkan, di beberapa kota besar seperti Damaskus dan Kufa, mulai muncul minat terhadap logika dan filsafat, meski masih terbatas. (Asari, 2018)

Perlu dicatat bahwa kurikulum pada masa ini disampaikan secara berjenjang dan bertahap, meskipun tidak dibakukan dalam sistem kelas. Seorang murid biasanya memulai dari pembelajaran Al-Qur'an dan dasar-dasar agama, lalu melanjutkan ke bidang-bidang yang lebih kompleks seperti fikih atau ushuluddin. Progres belajar tergantung pada kemampuan individu dan pengakuan dari gurunya. Seorang murid baru dianggap sah menjadi pengajar atau ulama jika telah mendapatkan ijazah atau pengakuan sanad dari gurunya sebagai bukti otoritas keilmuan.

Karakter kurikulum masa Bani Umayyah juga dipengaruhi oleh kebutuhan praktis negara, khususnya dalam bidang pemerintahan dan administrasi. Proyek Arabisasi yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan, misalnya, menuntut masyarakat Muslim memiliki kemampuan bahasa Arab yang kuat. Oleh karena itu, pendidikan bahasa menjadi penting tidak hanya untuk memahami Al-Qur'an, tetapi juga untuk keperluan administrasi negara, surat menyurat, dan penyusunan dokumen hukum. Pendidikan menjadi jalan strategis untuk memperkuat identitas Islam dan membentuk kader birokrasi yang cakap. (Yahdi & Achruh, 2024)

Dapat disimpulkan bahwa meskipun kurikulum pada masa Bani Umayyah belum terlembaga secara resmi, struktur dan isi materi yang diajarkan telah mencerminkan visi pendidikan yang integral antara kebutuhan spiritual, intelektual, dan sosial-politik. Pendidikan tidak hanya difokuskan pada aspek ritual dan akidah, tetapi juga diarahkan untuk menjawab tantangan kehidupan umat dalam konteks kekhalifahan yang semakin luas. Dengan kata lain, kurikulum pendidikan Islam di era Bani Umayyah adalah refleksi dari upaya membangun manusia yang religius sekaligus kontributif terhadap peradaban.

3. Bahasa dan Terjemahan Ilmu

Salah satu kebijakan paling berpengaruh pada masa Bani Umayyah yang berdampak langsung terhadap dunia pendidikan adalah proyek Arabisasi, khususnya dalam pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sebelumnya, bahasa administrasi di berbagai wilayah Islam masih menggunakan bahasa lokal seperti Yunani, Pahlavi (Persia Tengah), dan Koptik. Namun, dengan diterapkannya bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi negara, masyarakat terdorong untuk mempelajari bahasa Arab secara serius. Proyek ini bukan hanya berorientasi politik, tetapi juga memiliki konsekuensi besar dalam bidang pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. (Abdurahman, 2014)

Bahasa Arab menjadi instrumen utama untuk mengakses ajaran Islam, memahami Al-Qur'an, dan berpartisipasi dalam kehidupan intelektual Muslim. Hal ini menyebabkan pelajaran bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu dan balaghah, menjadi bagian penting dalam kurikulum pendidikan. Di sisi lain, kebijakan ini juga mempercepat proses integrasi budaya Islam dengan wilayah non-Arab yang ditaklukkan, karena bahasa menjadi medium pemersatu dalam peradaban Islam yang multicultural. (Suriyani & Nasir, 2024)

Maka dari itu, penguatan bahasa Arab dan mulai dikenalnya tradisi terjemahan menandai munculnya kesadaran linguistik dan ilmiah dalam dunia Islam. Bahasa Arab tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana artikulasi ilmu, budaya, dan identitas umat Islam. Hal ini menjadi bekal penting bagi munculnya pusat-pusat keilmuan dan kegiatan literasi yang lebih terorganisir di masa-masa berikutnya.

4. Lahirnya Cendekiawan Muslim

Perkembangan pendidikan di masa Bani Umayyah melahirkan generasi intelektual Muslim awal yang menjadi fondasi peradaban ilmu Islam. Meskipun belum lahir ilmuwan besar dalam bidang sains dan filsafat seperti di masa Abbasiyah, era Umayyah telah menghasilkan tokoh-tokoh penting dalam bidang keagamaan dan ilmu-ilmu dasar, terutama tafsir, hadits, dan fikih. Para cendekiawan ini lahir dari sistem pendidikan yang berbasis halaqah dan hubungan murid-guru yang intensif. (Niswah et al., 2025)

Beberapa tokoh besar yang muncul pada era ini antara lain Ibn Shihab al-Zuhri, yang dikenal sebagai peletak dasar kodifikasi hadits secara sistematis (Maulana, 2023), serta Hasan al-Bashri, seorang ulama dan sufi awal yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran Islam dan moralitas. Di bidang fikih, Ata' bin Abi Rabah dan Ibrahim al-Nakha'i dikenal sebagai mujtahid generasi tabi'in yang menjadi rujukan di wilayah Hijaz dan Irak. Kemunculan mereka menandai lahirnya tradisi keilmuan yang kokoh, dengan metodologi yang

mulai dibakukan melalui diskusi dan pembelajaran lintas wilayah.(Yusnadi & Fakhrurrazi, 2020)

Ciri khas cendekiawan pada masa ini adalah kemampuan multikeilmuan. Mereka menguasai lebih dari satu disiplin ilmu, misalnya seorang ahli hadits juga fasih dalam bahasa Arab dan fikih. Hal ini terjadi karena pendidikan pada masa itu bersifat terbuka dan terpadu, memungkinkan seorang pelajar berpindah dari satu majelis ilmu ke majelis lainnya untuk memperdalam berbagai bidang sekaligus. Selain itu, karena sistem pendidikan masih sangat bergantung pada otoritas guru, para ulama juga sangat menjaga sanad dan metode periwayatan, sehingga kualitas intelektual dijaga melalui kredibilitas keilmuan.(Yusnadi & Fakhrurrazi, 2020)

Lebih jauh, para cendekiawan ini juga memiliki pengaruh sosial dan politik yang signifikan. Mereka bukan hanya mengajar, tetapi juga terlibat dalam pembentukan opini publik, menjadi penasihat penguasa, hingga memimpin gerakan pemikiran. Maka, lahirnya ulama dan cendekiawan di masa Bani Umayyah tidak bisa dilepaskan dari peran sistem pendidikan yang memberi ruang kebebasan intelektual, mobilitas sosial, dan interaksi antarwilayah.

Dengan demikian, meskipun masa Bani Umayyah belum dikenal sebagai puncak zaman keemasan ilmu pengetahuan Islam, periode ini layak disebut sebagai fase fondasional bagi lahirnya para pemikir dan ulama besar di masa berikutnya. Tradisi keilmuan yang mereka wariskan menjadi fondasi kokoh yang menopang pertumbuhan ilmu pada masa Abbasiyah dan era kejayaan Islam lainnya.

Perkembangan pendidikan Islam pada masa Dinasti Bani Umayyah menampilkan wajah awal dari sistem keilmuan yang kelak mencapai puncaknya pada era Abbasiyah. Meskipun pemerintahan Umayyah lebih dikenal melalui ekspansi militer dan stabilitas politiknya, kontribusi mereka dalam menciptakan iklim kondusif bagi pendidikan sangat layak diperhitungkan. Berdirinya halaqah-halaqah di masjid, peran aktif ulama dan qari, serta perluasan fungsi rumah-rumah belajar menjadi indikator bahwa pendidikan telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Muslim.(Harahap, 2019) Dalam pandangan penulis, justru kesederhanaan sistem ini menjadi kekuatannya: ia bersifat organik, inklusif, dan langsung menyentuh kebutuhan umat.

Salah satu kekuatan sistem pendidikan di masa ini adalah fleksibilitas dan keterbukaannya. Tidak ada jenjang kelas seperti dalam sistem modern, namun hubungan murid-guru begitu kuat dan menghormati sanad keilmuan. Hal ini menciptakan atmosfer pembelajaran yang egaliter, terbuka bagi siapa pun, termasuk dari kalangan non-Arab. Dalam analisis penulis, model pendidikan seperti ini justru menjadi cermin ideal pendidikan Islam

yang sesungguhnya berbasis niat, etika, dan pencarian ilmu karena Allah, bukan karena gelar atau prestise sosial.

Secara konten, kurikulum pendidikan Islam saat itu sangat menekankan pada ilmu-ilmu dasar keislaman. Penulis melihat ini sebagai langkah strategis yang cerdas, mengingat masyarakat Muslim saat itu sedang dalam fase awal pembentukan identitas keagamaannya. Fokus pada Al-Qur'an, hadits, fikih, dan bahasa Arab memungkinkan umat Islam memahami fondasi agamanya dengan kuat sebelum membuka diri pada ilmu-ilmu luar. (Permana, 2018) Namun demikian, benih-benih integrasi antara ilmu agama dan sains juga mulai tampak, terutama dengan munculnya ketertarikan terhadap karya-karya medis dan astronomi dari peradaban sebelumnya. Inilah cikal bakal dari paradigma keilmuan Islam yang holistik.

Kebijakan Arabisasi yang dijalankan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan bukan hanya langkah politik, tetapi juga edukatif. Dengan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi dan pendidikan, pemerintah secara tidak langsung menstandarkan alat komunikasi keilmuan. (Hayani & Bakhtiar, 2020) Pandangan penulis menyebut ini sebagai "revolusi linguistik" yang menyatukan umat Islam dalam satu bahasa ilmiah, yang kelak memudahkan proses kodifikasi ilmu dan tradisi tulis-menulis. Bahasa Arab tidak hanya menjadi bahasa wahyu, tetapi juga bahasa ilmu dan budaya. Dalam jangka panjang, hal ini mempercepat proses islamisasi sekaligus transformasi intelektual dunia Islam.

Dari sisi kelembagaan, meskipun belum terbentuk madrasah atau universitas formal, penulis berpendapat bahwa sistem halaqah yang tersebar luas justru menciptakan keilmuan berbasis komunitas. Hal ini sangat relevan dalam konteks masyarakat pasca-kenabian yang masih bersifat plural dan transisi. Guru-guru yang dihormati karena ilmunya, bukan karena afiliasi politik atau status sosial, menjadi penopang utama keberlangsungan pendidikan. Inilah yang membedakan pendidikan masa Umayyah dengan sistem pendidikan modern yang sering kali terlalu bergantung pada birokrasi dan struktur formal.

Kelahiran cendekiawan Muslim awal seperti Ibn Shihab al-Zuhri, Hasan al-Bashri, dan Ata' bin Abi Rabah menjadi bukti keberhasilan sistem pendidikan masa ini. (Norlaila & Rasyid, n.d.) Penulis menilai bahwa keberadaan mereka tidak muncul secara kebetulan, tetapi merupakan hasil dari ekosistem pendidikan yang sehat, meskipun belum terinstitusionalisasi. Mereka adalah produk dari halaqah, dari diskusi tanpa sekat, dan dari interaksi lintas wilayah yang memperkaya pandangan keilmuan. Perpaduan antara kesalehan personal, keluasan ilmu, dan kecakapan sosial inilah yang menjadi ciri khas ulama masa Bani Umayyah.

Dalam kesimpulan analitis, penulis menegaskan bahwa era Bani Umayyah merupakan titik awal peradaban ilmu dalam Islam. Meskipun belum disebut sebagai zaman keemasan, era ini telah menyemai fondasi yang kokoh: sistem pendidikan berbasis komunitas, kurikulum

keislaman yang kuat, bahasa ilmiah yang disatukan, dan lahirnya ulama yang memiliki kredibilitas. Maka, memahami pendidikan pada masa ini bukan hanya membaca sejarah, tetapi juga merenungkan model ideal pendidikan Islam: yang membebaskan, mendalam, dan menjunjung adab. Sebuah pelajaran berharga bagi umat Islam modern yang ingin membangun peradaban keilmuan secara utuh dan berakar.

Kebijakan Pemerintah yang Mendukung Pendidikan Islam pada Masa Bani Umayyah

Dalam kajian sejarah Islam, peran pemerintah dalam mendukung pendidikan tidak selalu tampak dalam bentuk institusi formal atau regulasi administratif sebagaimana dalam konteks modern. Namun, pada masa Dinasti Bani Umayyah, dukungan pemerintah terhadap pendidikan justru hadir dalam bentuk kebijakan strategis dan kondisi sosial-politik yang memungkinkan aktivitas ilmiah tumbuh dengan subur. Penulis berpandangan bahwa justru karena sifat dukungannya yang tidak formal inilah, pendidikan Islam berkembang secara lebih organik, inklusif, dan merakyat.

Salah satu kebijakan monumental yang secara tidak langsung berdampak besar pada pendidikan adalah kebijakan Arabisasi. Kebijakan ini pertama kali digagas secara sistematis oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan. Sebelumnya, berbagai wilayah kekuasaan Islam masih menggunakan bahasa lokal seperti Yunani di Syam, Pahlavi di Persia, dan Koptik di Mesir. (As-Tsauri, 2020)

Efek dari kebijakan Arabisasi terhadap pendidikan dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Bahasa Arab menjadi alat utama transmisi ilmu: masyarakat didorong untuk mempelajari bahasa Arab demi memahami teks-teks keislaman.
- b) Standarisasi bahasa pengajaran: ulama dan murid dari berbagai wilayah kini memiliki kesamaan bahasa ilmiah.
- c) Pemantapan identitas keislaman: bahasa menjadi pemersatu sekaligus penjaga orisinalitas ajaran agama.

Penulis menilai bahwa langkah Arabisasi bukan hanya manuver politik, melainkan strategi peradaban yang jangka panjang. Dengan menyatukan umat Islam dalam satu bahasa ilmiah, pemerintah Umayyah secara tidak langsung membuka jalan bagi pembakuan ilmu dan tradisi tulis yang akan berkembang pesat di era selanjutnya.

Selain kebijakan bahasa, pemerintah juga memberikan kontribusi penting melalui pembangunan infrastruktur masjid. Di banyak kota besar seperti Damaskus, Kufa, Basrah, hingga Fustat, masjid-masjid utama dibangun dan difungsikan tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran. Di dalam masjid, berlangsung halaqah-halaqah yang menjadi sarana utama pendidikan Islam saat itu. Pemerintah tidak selalu mengatur

langsung isi pengajaran, tetapi menyediakan ruang yang layak dan fasilitas yang menunjang kegiatan ilmiah.(Muhajir et al., 2024)

Beberapa bentuk dukungan infrastruktur dapat dilihat dalam:

- a) Pembangunan masjid besar dan permanen.
- b) Pemeliharaan fasilitas masjid untuk keperluan belajar-mengajar.
- c) Pemberian posisi sosial terhormat bagi para imam dan qari masjid, yang juga berfungsi sebagai pendidik masyarakat.

Penulis meyakini bahwa ruang belajar yang nyaman dan terbuka seperti masjid memainkan peran penting dalam menciptakan budaya intelektual Islam yang demokratis dan partisipatif.

Kebijakan lain yang mendukung pendidikan adalah penjaminan stabilitas politik dan keamanan sosial di wilayah kekuasaan Islam. Meskipun pemerintahan Umayyah tidak lepas dari konflik, tetapi pada masa-masa tertentu, seperti pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, suasana sosial yang damai mendorong tumbuhnya tradisi keilmuan yang sehat. Pemerintah menyediakan ruang bebas konflik bagi ulama untuk mengajar dan berdakwah.(Arissanti, 2022)

Peran pemerintah dalam mendukung pendidikan juga tampak dalam perlindungan dan pengakuan terhadap ulama dan ahli ilmu. Para ulama diberi otonomi dalam menyampaikan ilmu dan tidak ditekan secara politik. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka dijadikan penasihat moral oleh khalifah. Ulama seperti Ibn Shihab al-Zuhri memperoleh dukungan penuh dari istana untuk mendidik keluarga kerajaan dan menyusun riwayat hadits.

Dalam hal ini, dukungan terhadap ulama dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk(Duryat, 2021):

- a) Kedekatan dengan istana namun tetap independen secara ilmiah.
- b) Diberi akses untuk mengajar di ruang publik dan privat.
- c) Tidak dikenai tekanan untuk mengubah isi ajaran demi kepentingan politik.

Dari seluruh kebijakan tersebut, penulis berpendapat bahwa peran pemerintah Umayyah lebih tepat disebut sebagai fasilitator peradaban, bukan sebagai pengendali ilmu. Negara tidak terlalu mencampuri isi dan arah pendidikan, tetapi menciptakan ekosistem yang memungkinkan ilmu berkembang: melalui bahasa, infrastruktur, stabilitas, dan penghargaan terhadap kaum intelektual.

Maka, meskipun Dinasti Bani Umayyah tidak mendirikan madrasah atau sistem pendidikan formal seperti di era Abbasiyah, mereka telah memberikan fondasi struktural dan kultural bagi berkembangnya pendidikan Islam. Tanpa kebijakan-kebijakan tersebut, mustahil tradisi keilmuan Islam dapat tumbuh dan mengakar di tengah masyarakat Muslim awal.

4. KESIMPULAN

Pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah merupakan fondasi awal bagi terbentuknya peradaban ilmu dalam Islam. Meskipun belum terdapat institusi formal seperti madrasah atau universitas, namun sistem pendidikan berbasis halaqah, masjid, dan rumah-rumah ulama menunjukkan struktur keilmuan yang kuat dan fungsional. Kurikulum yang berpusat pada ilmu-ilmu agama, penguatan bahasa Arab melalui kebijakan Arabisasi, serta keterlibatan aktif ulama dalam pengajaran telah menciptakan ekosistem pendidikan yang produktif dan inklusif. Stabilitas politik yang relatif terjaga juga memberi ruang bagi tumbuhnya tradisi keilmuan dan munculnya tokoh-tokoh intelektual awal yang berperan besar dalam membentuk pemikiran Islam klasik.

Melalui pendekatan historis dan deskriptif-kualitatif, penelitian ini menegaskan bahwa era Bani Umayyah bukan hanya periode ekspansi militer, tetapi juga momentum penting dalam sejarah pendidikan Islam. Pemerintah, meskipun tidak secara langsung mengelola pendidikan, menyediakan prasyarat sosial dan kebijakan yang memungkinkan pendidikan tumbuh secara alami dan berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa sinergi antara ulama, masyarakat, dan negara menjadi faktor kunci dalam membangun tradisi keilmuan Islam yang kokoh dan adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, D. (2014). *Komunitas multikultural dalam sejarah Islam periode klasik*. Penerbit Ombak.
- Ahmad, J. (2018). Desain penelitian analisis isi (content analysis). *Research Gate*, 5(9), 1–20.
- Anton, A., Setiawan, Y., Hanifah, H. N., Rahayu, F., & Sona, D. (2024). Sejarah perkembangan Bani Umayyah dan peradaban tiga kerajaan Islam. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(1), 543–550.
- Arissanti, T. W. (2022). *Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam dunia pendidikan Islam* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang].
- Asari, H. (2018). *Sejarah pendidikan Islam: Membangun relevansi masa lalu dengan masa kini dan masa depan*.
- As-Tsauri, M. S. (2020). *Sejarah pendidikan Islam*. Guepedia.
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Basri, M., Ain, D. N. A., Nabila, N., & Wibowo, S. (2024). The story of the Umayyad Caliph. *EDUCTUM: Journal Research*, 3(1), 8–13.
- Berliana, S. N. C. I., & Zaman, B. (2024). Transformasi pendidikan di era Umayyah: Antara kebijakan dan rekonstruksi di masa sekarang. *Al Ghazali*, 7(1), 73–90.

- Duryat, H. M. (2021). *Kepemimpinan pendidikan: Meneguhkan legitimasi dalam berkontestasi di bidang pendidikan*. Penerbit Alfabeta.
- Efendi, I., & Sesmiarni, Z. (2022). Pentingnya metodologi penelitian dalam pendidikan Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 1(2), 59–68.
- Harahap, M. S. (2019). Sejarah Dinasti Bani Umaiyah dan pendidikan Islam. *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(2), 21.
- Hayani, S., & Bakhtiar, N. (2020). Arabisasi pemerintahan Islam pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(2), 204–212.
- Husaini, A. (2020). *Filsafat ilmu: Perspektif Barat & Islam*. Gema Insani.
- Malik, M. K. (2017). Potret kekhalifahan Islam: Dinamika kepemimpinan Islam pasca al-Khulafâ al-Râsyidûn hingga Turki Utsmani. *TSAQAFAH*, 13(1), 135–156.
- Maulana, R. (2023). Historiografi kodifikasi hadis. *AL-THIQA: Jurnal Ilmu Keislaman*, 6(1), 1–17.
- Muhajir, M., Rismawati, R., & Istiqomah, N. (2024). Sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW, Khulafa Al-Rasyidin, dan Bani Umayyah. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*, 6(3), 171–177.
- Niswah, C., Rahmadani, A., Walbaradi, S., & Kodir, A. (2025). Pendidikan Islam di era Bani Umayyah: Membangun sistem pendidikan Islam yang berkembang. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3), 1691–1700.
- Norlaila, M. A., & Rasyid, M. (n.d.). *Sistem dan lembaga pendidikan Islam: Kajian sejarah Islam*. Penerbit Adab.
- Permana, F. (2018). Pendidikan Islam dan pengajaran Bahasa Arab pada masa Dinasti Umayyah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 12(2), 47. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.74>
- Rachman, T. (2018). Bani Umayyah di lihat dari tiga fase. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 2(1), 86–98.
- Rofiqo, A., & Rizal, F. (2019). Kebijakan ekonomi pada masa Kekhalifahan Bani Umayyah (Studi kasus keberhasilan kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan kegagalan Gubernur Nasar bin Sayyar pada masa Khalifah Marwan II 744–750 Masehi). *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 16(2), 226–236.
- Suherawati, S., Ritonga, S., Erlina, G., & Suswanto, S. (2025). Pemikiran pendidikan masa Bani Umayyah Damaskus dan Andalusia. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora)*, 9(1), 31–42.
- Sulastri, T. (2016). Fungsi madrasah dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam. *QATHRUNA*, 3(02), 127–142.
- Suriyani, S., & Nasir, M. (2024). Transformasi pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. *Sagoe Literasi*, 1(2), 105–112.

- Wiranata, R. Z. R. S., & Abidin, M. Z. (2021). Perbandingan sistem pendidikan pada masa Dinasti Umayyah dan sistem pendidikan pada masa Dinasti Abasiyyah (Analisis komparatif dengan pendekatan historis). *Raudhah Proud to be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 6(1), 23–45.
- Yahdi, M., & Achruh, A. (2024). Karakter pendidikan Islam masa klasik dan modern. *AIJER: Algazali International Journal of Educational Research*, 7(1), 7–20.
- Yusnadi, Y., & Fakhrurrazi, F. (2020). Pendidikan Islam pada masa Daulah Bani Umayyah. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 12(2), 163. <https://doi.org/10.47498/tadib.v12i02.383>